

Tax Restitution for the Joint Operation Project of PT Brantas Abipraya (Persero)

Restitusi Pajak pada Proyek Kerja Sama Operasi PT Brantas Abipraya (Persero)

Muhammad Kevin Arsyadurrahman¹, Zaenal Arifin²
Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ekonomika,
Universitas Islam Indonesia

¹karsyadurrahman@gmail.com, ²zaenal@uii.ac.id

Abstract

PT Brantas Abipraya (Persero) is a state-owned enterprise (BUMN) operating in the construction industry. Within this sector, the management of Value Added Tax (PPN) through restitution mechanisms is critical due to its potential impact on the company's liquidity stability. This research employs a descriptive quantitative approach, utilizing secondary data comprising financial statements, tax restitution records, and operating cash flow reports for the 2020–2022 period. Data analysis was conducted using descriptive statistics and simple linear regression. The results indicate that tax restitution has a positive relationship with operating cash flow, yielding a regression coefficient of 154.425. However, statistical analysis reveals that this influence is not significant ($p > 0.05$), primarily attributed to the limited number of observations within the study period. In practical terms, despite the lack of statistical significance, tax restitution serves as a vital source of supplementary liquidity to meet operational requirements, particularly during the initial phases of projects. This study further identifies that the effectiveness of the restitution process is heavily contingent upon administrative completeness, audit procedures, and document management. The conclusion emphasizes the necessity of optimization strategies through enhanced administrative compliance and the utilization of information technology to mitigate the adverse effects of delayed restitution on corporate cash flow.

Keywords: Tax Restitution, VAT, Operating Cash Flow, Joint Operation (JO), Construction.

Abstrak

PT Brantas Abipraya (Persero), merupakan sebuah perusahaan konstruksi yang dimiliki oleh negara (BUMN). Dalam industri konstruksi, pengelolaan PPN melalui mekanisme restitusi menjadi krusial karena potensi dampaknya terhadap stabilitas likuiditas perusahaan. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan keuangan, catatan restitusi pajak, dan laporan arus kas operasi periode 2020–2022. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis statistik deskriptif dan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi pajak memiliki hubungan positif terhadap arus kas operasi dengan koefisien regresi sebesar 154,425. Namun, secara statistik pengaruh tersebut ditemukan tidak signifikan ($p > 0,05$), yang sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan jumlah observasi dalam periode penelitian. Secara praktis, meskipun tidak signifikan secara statistik, restitusi pajak berfungsi sebagai sumber likuiditas tambahan yang vital untuk menutupi kebutuhan operasional, terutama pada fase awal proyek. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa efektivitas restitusi sangat bergantung pada kelengkapan administrasi, proses audit, dan manajemen dokumen. Simpulan dari penelitian ini menekankan perlunya strategi optimalisasi melalui peningkatan kepatuhan administrasi dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meminimalkan dampak keterlambatan restitusi terhadap arus kas perusahaan.

Kata Kunci: Restitusi Pajak, PPN, Arus Kas Operasi, Kerja Sama Operasi (KSO), Konstruksi.

1. Pendahuluan

Dalam dunia bisnis konstruksi, kerja sama operasi (KSO) menjadi strategi umum yang digunakan oleh perusahaan untuk menggabungkan sumber daya dan keahlian guna mengerjakan proyek berskala besar. Namun, skema KSO juga membawa

tantangan tersendiri, salah satunya dalam hal pengelolaan perpajakan. Pengelolaan aspek perpajakan, terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menuntut ketelitian yang tinggi mengingat aktivitas Kerja Sama Operasi (KSO) umumnya memiliki nilai perputaran dana yang masif dan melibatkan beragam kemitraan. Dalam dinamika bisnis tersebut, apabila akumulasi PPN masukan tercatat melampaui jumlah PPN keluaran, entitas bisnis memiliki legalitas untuk menempuh prosedur restitusi pajak. Mekanisme pengembalian ini pada dasarnya merupakan hak konstitusional bagi Wajib Pajak Badan untuk menarik kembali kelebihan pembayaran pajak yang timbul akibat ketimpangan saldo kontribusi tersebut (Mangundap & Tirayoh, 2016).

Restitusi PPN memiliki peran krusial dalam menjaga likuiditas dan ketersediaan kas—terutama bagi perusahaan konstruksi yang menerapkan sistem pembayaran termin panjang. Sebagaimana diungkap oleh International Finance Corporation (IFC), bagian dari World Bank Group, *“Accelerating the payment of VAT refunds the government owes to taxpayers is important to improve competitiveness and business environment, since such delays may affect businesses’ liquidity flow and trust in the system”* (Pinto, Bermúdez, & Scot, 2024). Keterlambatan pengembalian ini memaksa perusahaan menutup kekurangan kas operasional menggunakan sumber lain seperti utang atau penundaan pembayaran, yang dapat meningkatkan beban bunga dan risiko proyek.

Pada praktiknya, proses restitusi PPN dalam skema KSO sering mengalami hambatan administratif dan kompleksitas teknis yang dapat berdampak signifikan terhadap arus kas perusahaan konstruksi. Sebuah studi dari Tiongkok menunjukkan bahwa pengembalian kredit PPN (VAT credit refund) dapat memberikan keleluasaan dalam perputaran kas dan meningkatkan produktivitas, termasuk peningkatan Total Factor Productivity sebesar 6,96% (Guo & Li, 2023). Kondisi ini menegaskan bahwa keterlambatan restitusi, terutama dalam proyek KSO dengan modal tinggi dan margin sempit, tidak hanya menghambat kelancaran operasi, tetapi juga mengurangi efisiensi modal dan daya saing perusahaan.

Studi kasus dari KSO Nindya–Prana dalam proyek preservasi jalan di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bagaimana karakteristik transaksi dengan bendahara negara dapat menyebabkan nilai Pajak Keluaran menjadi nol (kode 020), sementara Pajak Masukan tetap tercatat secara normal (kode 010) (RZ, NASUTION, & BARUS, 2022). Hal ini menjadikan laporan SPT PPN bulanan KSO tersebut selalu dalam kondisi Lebih Bayar (RZ, NASUTION, & BARUS, 2022). Konsekuensinya, perusahaan harus melalui proses restitusi yang memakan waktu, dengan tetap menanggung beban operasional harian proyek. Kondisi ini relevan dengan tantangan yang juga dihadapi oleh PT Brantas Abipraya dan PT Wijaya Graha Prima dalam proyek pembangunan Jalan Wae Kelambu, Labuan Bajo, yang memiliki struktur pembiayaan dan mitra kerja serupa.

Dalam pelaksanaannya, restitusi PPN pada proyek-proyek pemerintah yang bersumber dari dana APBN atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) cenderung memiliki waktu tunggu yang lebih panjang karena keterlibatan administrasi antar instansi. Prosedur verifikasi oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) membutuhkan dokumen pendukung yang lengkap dan validasi internal yang berlapis. Ketidaktepatan atau keterlambatan penyampaian dokumen seperti faktur pajak, kontrak, atau bukti transfer dapat menjadi penyebab utama restitusi tertunda, sebagaimana ditemukan pada banyak KSO sektor konstruksi.² Ini memperkuat urgensi penguatan manajemen pajak pada proyek kerja sama operasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai restitusi pajak dalam KSO PT Brantas Abipraya bersama PT Wijaya Graha Prima menjadi penting untuk melihat sejauh mana tantangan administrasi perpajakan mempengaruhi arus kas proyek dan strategi yang diterapkan perusahaan dalam menghadapi keterlambatan pencairan restitusi. Dengan fokus pada proyek pembangunan jalan Wae Kelambu di Labuan Bajo, studi ini diharapkan memberikan gambaran konkret mengenai dinamika pengelolaan PPN dalam KSO konstruksi dan menjadi masukan bagi optimalisasi kebijakan fiskal di sektor jasa konstruksi.

2. Metode

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, karena fokus utamanya adalah menganalisis data numerik terkait restitusi pajak dan arus kas dari proyek kerja sama operasi (KSO) PT Brantas Abipraya dengan PT Wijaya Graha Prima. Pendekatan ini dipilih karena data yang digunakan bersumber dari dokumen keuangan aktual dan laporan perpajakan, yang memungkinkan dilakukan pengukuran, perhitungan, serta interpretasi atas pengaruh restitusi terhadap arus kas perusahaan.

Jenis penelitian ini bersifat non-eksperimental, karena tidak ada manipulasi variabel, melainkan hanya observasi atas data yang tersedia. Penelitian ini juga tidak melibatkan responden melalui wawancara atau survei, melainkan murni analisis data sekunder yang telah disediakan oleh perusahaan

Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah proyek kerja sama operasi (KSO) antara PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Wijaya Graha Prima, khususnya dalam proyek pembangunan Jalan Wae Kelambu di Labuan Bajo.

Pemilihan unit analisis ini didasarkan pada:

1. Relevansi proyek dengan topik restitusi PPN dan dampaknya terhadap arus kas.
2. Ketersediaan data historis berupa laporan faktur, buku besar, dan data pengajuan serta pencairan restitusi.
3. Keterlibatan peneliti secara langsung dalam pengelolaan data keuangan proyek selama masa magang.

Deskripsi unit analisis:

1. KSO melibatkan dua perusahaan konstruksi BUMN dan swasta.

Data dan Sumber Data

Data diperoleh dari dokumen internal PT Brantas Abipraya, yang terdiri dari:

1. Lembar kerja Pleno Restitusi, yang berisi informasi pengajuan dan status pencairan restitusi PPN.
2. Arus uang-barang, yang memuat catatan penerimaan dan pengeluaran kas terkait proyek.
3. Faktur Keluaran, sebagai dasar pencatatan PPN Keluaran.

Pengukuran Variabel Penelitian

1. Restitusi Pajak

Variabel restitusi pajak diukur berdasarkan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diajukan dan/atau diterima kembali oleh perusahaan dalam periode tertentu.

Restitusi pajak dihitung dari selisih antara Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Restitusi Pajak (RP)} = \text{PPN Masukan} - \text{PPN Keluaran}$$

Apabila hasil perhitungan menunjukkan nilai positif, maka perusahaan mengalami pajak lebih bayar yang dapat diajukan sebagai restitusi. Data restitusi pajak diperoleh dari dokumen perpajakan dan laporan keuangan perusahaan

2. Kinerja Arus Kas

Kinerja arus kas diukur menggunakan arus kas operasi, karena mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari kegiatan operasional utama. Arus kas operasi dihitung berdasarkan laporan arus kas perusahaan dengan rumus: Arus Kas Operasi (AKO) = Penerimaan Kas Operasional - Pengeluaran Kas Operasional

Nilai arus kas operasi digunakan untuk menilai kondisi likuiditas perusahaan serta dampak penerimaan restitusi pajak terhadap ketersediaan kas.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Analisis deskriptif, digunakan untuk menggambarkan data restitusi pajak dan arus kas PT Brantas Abipraya berdasarkan data laporan keuangan dan dokumen perpajakan.
2. Analisis regresi linear sederhana, digunakan untuk menganalisis pengaruh restitusi pajak (RP) terhadap arus kas operasi (AKO). Model regresi yang digunakan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{AKO} = a + b \text{ RP}$$

Keterangan:

AKO = Arus kas perusahaan

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

RP = Restitusi pajak

3. Analisis strategi restitusi pajak, dilakukan untuk mengidentifikasi kebijakan dan langkah yang diterapkan perusahaan dalam mengelola restitusi pajak guna menjaga kelancaran arus kas.

Analisis faktor keterlambatan restitusi pajak, dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan prosedural dan administratif dalam proses restitusi pajak serta dampaknya terhadap arus kas proyek.

3. Hasil dan Pembahasan

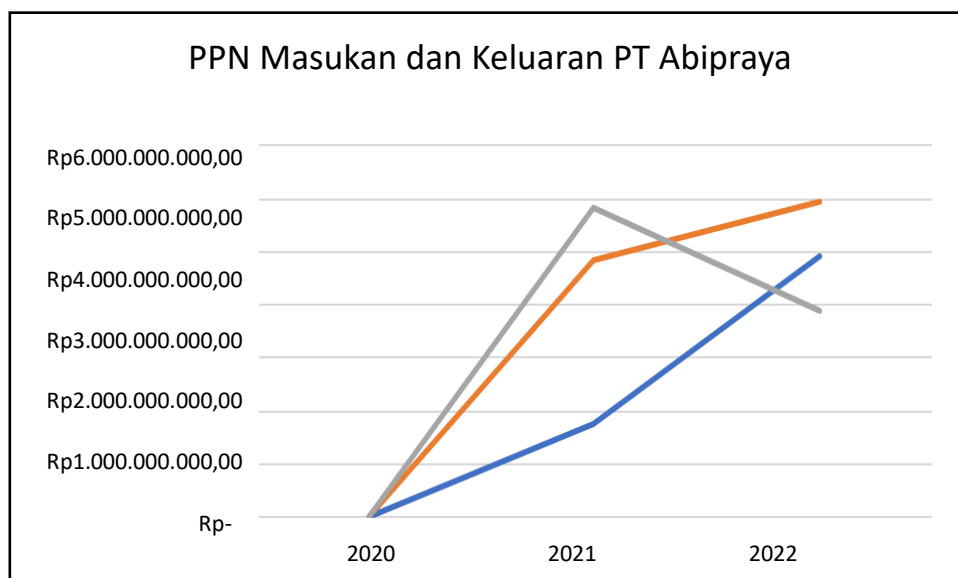
Restitusi Pajak

PT Abipraya mengalami fluktuasi yang signifikan terhadap pajak PPN yang dimilikinya. Fluktuasi ini mencerminkan intensitas pengadaan barang/jasa (PPN Masukan) dibandingkan dengan penagihan termin proyek kepada pelanggan (PPN Keluaran) seperti yang terdapat pada Tabel 1 dan divisualisasikan pada Gambar 1 berikut ini.

Tabel 1. PPN Masukan dan Keluaran PT Abipraya

Tahun	PPN masukan	PPN Keluaran
2020	Rp 1.768.435.880,00	Rp 4.917.110.636,20
2021	Rp 4.863.842.795,00	Rp 5.954.743.169,65

2022	Rp	5.833.998.428,00	Rp	3.880.430.843,30
------	----	------------------	----	------------------



Gambar 1. Grafik PPN Masukan dan Keluaran PT Abipraya

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa pada tahun 2020-2021 PPN Keluaran secara konsisten lebih tinggi daripada PPN Masukan. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai penagihan proyek kepada pemberi kerja (pelanggan) melebihi nilai belanja dari pemasok. Secara administratif, kondisi ini menempatkan perusahaan dalam posisi kurang bayar, di mana perusahaan wajib menyetorkan selisih pajak ke kas negara. Pada 2020, selisih mencapai minus Rp 3,15 miliar, yang menurun menjadi minus Rp 1,09 miliar pada 2021, menunjukkan peningkatan gradual dalam pengadaan material.

Pada tahun 2022 Terjadi pergeseran signifikan pada tahun 2022, di mana PPN Masukan meningkat 19,9% dari tahun sebelumnya, sementara PPN Keluaran justru menurun drastis sebesar 34,8%. Pergeseran ini menghasilkan selisih neto positif sebesar Rp 1,95 miliar, mengubah posisi pajak perusahaan menjadi lebih bayar. Faktor utama kemungkinan adalah ekspansi proyek yang memerlukan pengadaan lebih intensif, sementara penagihan proyek mengalami keterlambatan atau penurunan volume.

Dari data PPN masukan dan PPN keluaran tersebut didapatkan nilai restitusi perusahaan seperti yang terdapat pada Tabel 2 dan divisualisasikan pada Gambar 2 Data restitusi pajak dalam laporan keuangan sepenuhnya selaras dengan selisih neto PPN, menunjukkan bahwa seluruh selisih langsung diklasifikasikan sebagai hak restitusi (jika positif) atau kewajiban setor (jika negatif). Ini mencerminkan kepatuhan perusahaan terhadap prinsip akuntansi pajak, di mana restitusi menjadi instrumen untuk mengimbangi kelebihan atau kekurangan pembayaran PPN.

Tabel 2. Restitusi PPN PT Abipraya

Tahun	Restitusi PPN
2020	-Rp 3.148.674.756,20
2021	-Rp 1.090.900.374,65
2022	Rp 1.953.567.584,70



Gambar 2. Grafik Besaran Restitusi PPN PT Abipraya

Pada tahun 2020 nilai restitusi tercatat negatif sebesar Rp 3,14 miliar. Angka negatif ini secara teknis merepresentasikan posisi kurang bayar, di mana perusahaan telah memenuhi kewajiban dengan menyetorkan jumlah tersebut ke negara. Ini sejalan dengan dominasi PPN Keluaran pada periode tersebut. Tahun 2021 juga mengalami restitusi negatif sebesar Rp 1,09 miliar, menandakan kelanjutan fase kurang bayar meskipun selisihnya mengecil. Namun, pada tahun 2022 nilai restitusi berubah positif menjadi Rp 1,95 miliar, mengindikasikan adanya klaim pengembalian kelebihan pajak yang diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Posisi ini timbul dari dominasi PPN Masukan, yang memberikan hak kredit pajak lebih besar daripada kewajiban keluaran.

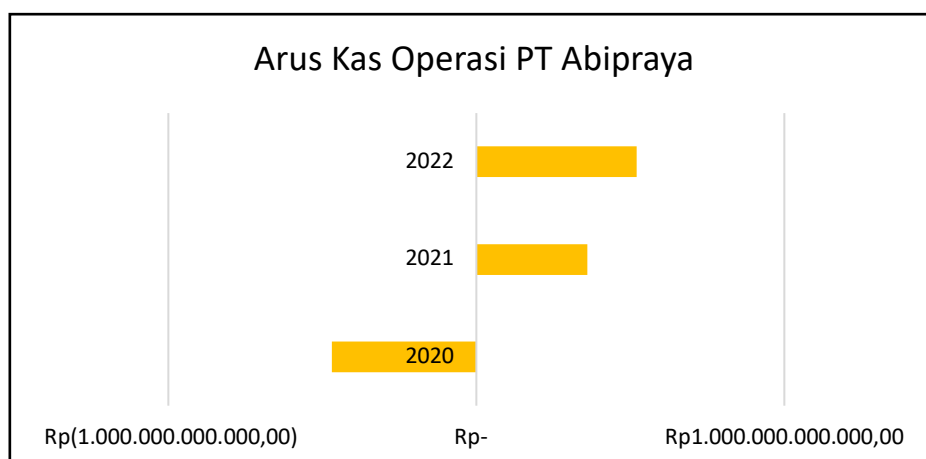
Arus Kas Operasi

Laporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi (*Cash Flows from Operating Activities*) PT Brantas Abipraya (Persero) berdasarkan data yang Anda berikan untuk periode 2020–2022 dapat dilihat pada Tabel 3 dan Gambar 3 Data ini mencerminkan dinamika operasional perusahaan sebagai BUMN di sektor konstruksi, di mana arus kas operasi sangat dipengaruhi oleh siklus proyek (pengeluaran besar di awal proyek untuk pembayaran kontraktor/subkontraktor dan pemasok, serta penerimaan dari pelanggan/pemerintah yang sering tertunda).

Tabel 1. Arus Kas Operasi (AKO) PT Abipraya

Arus Kas Operasi	Tahun		
	2022	2021	2020
Penerimaan dari pelanggan	3.891.204.710.026	2.864.927.900.450	2.243.999.397.226
Pembayaran ke pemasok, sub kontraktor karyawan dan pihak ketiga lainnya	(3.289.264.929.710)	(2.319.364.424.828)	(2.705.211.893.260)

Penerimaan restitusi pajak	6.471.769.422	6.096.839.572	4.947.677.442
Pembayaran pajak	(237.643.908.355)	(213.631.945.423)	(62.267.280.693)
Penerimaan bunga	(172.742.758.784)	(157.617.069.970)	(118.830.014.749)
Pembayaran bunga dan beban keuangan	136.384.216.224	173.662.203.330	162.503.956.927
Penerimaan Klaim dan lainnya - bersih	46.279.807.378	5.655.132.492	5.729.579.502
Kas bersih (digunakan untuk) diterima dari aktivitas operasi	380.688.906.201	359.728.635.623	(469.128.577.605)



Gambar 3. Grafik Arus Kas Operasi (AKO) PT Abipraya

Pada tahun 2020 terdapat dominasi pengeluaran operasional yang tinggi seperti pembayaran ke karyawan, kontraktor, dan pihak ketiga mencapai Rp 2,7 triliun, sementara penerimaan dari pelanggan hanya Rp 2,2 triliun. Ini mencerminkan fase intensif proyek (pengeluaran di muka untuk material, subkontraktor, dan tenaga kerja) di tengah dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan penundaan pembayaran dari pelanggan (sering pemerintah/infrastruktur). Selain itu, Penerimaan restitusi pajak positif tapi tidak cukup menutup yaitu Rp 4,95 triliun termasuk dari restitusi PPN (seperti yang dibahas sebelumnya, posisi kurang bayar di tahun sebelumnya), namun tetap tidak mampu mengimbangi outflow besar.

Pada tahun 2021 terjadi peningkatan penerimaan pelanggan signifikan yakni naik dari Rp 2,2 triliun menjadi Rp 2,86 triliun (+27%), menunjukkan pemulihan pembayaran termin proyek pasca-pandemi dan percepatan eksekusi proyek infrastruktur pemerintah. Pengeluaran operasional terkendali terlihat pada

pembayaran ke kontraktor/pihak ketiga naik menjadi Rp 2,32 triliun, tapi penerimaan restitusi pajak tetap tinggi (Rp 6,1 triliun), sehingga membantu menutup *gap*.

Tahun 2022 penerimaan pelanggan melonjak tajam sebesar Rp 3,89 triliun (+36% dari 2021), mencerminkan volume proyek tinggi dan penagihan yang lebih lancar. Kontribusi restitusi pajak tertinggi sebesar Rp 6,42 triliun masuk (sejalan dengan analisis sebelumnya: fase lebih bayar PPN 2022 menghasilkan klaim restitusi Rp 1,95 miliar neto, tapi total inflow restitusi lebih besar karena akumulasi).

Hasil Uji Pengaruh Restitusi Pajak terhadap Arus Kas Operasi

Model regresi sederhana yang diterapkan dapat dirumuskan sebagai persamaan dasar di mana arus kas operasi diprediksi berdasarkan nilai restitusi pajak, dengan tujuan memahami seberapa besar kontribusi restitusi dalam mendukung likuiditas operasional perusahaan. Secara keseluruhan, hasil menunjukkan adanya hubungan positif antara kedua variabel, meskipun tidak signifikan secara statistik, yang mencerminkan peran restitusi sebagai buffer kas di tengah siklus proyek yang panjang dan volatile. Adapun tabel hasil pengujian regresi dengan menggunakan perangkat lunak EXCEL dengan *add in Data Analys* pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Hasil Pengujian

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
<i>Intercept</i>	208,1024118	242,3281016	0,858763018	0,548280393
Restitusi	154,4256806	108,6602357	1,421179326	0,390353212
<i>Regression Statistics</i>				
<i>Multiple R</i>	0,817830565			
<i>R Square</i>	0,668846833			
<i>Adjusted R Square</i>	0,337693666			
<i>Standard Error</i>	394,4635827			
<i>Observations</i>	3			

Sumber: Hasil pengolahan data, Microsoft Excel

Berdasarkan hasil uji tersebut didapatkan persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$AKO = 208,102 + 154,425 (RP)$$

Persamaan ini mengindikasikan bahwa konstanta sebesar 208,102 merupakan nilai estimasi Arus Kas Operasi (AKO) saat variabel Restitusi PPN bernilai nol. Secara teoritis, ini menunjukkan adanya basis kas operasional yang tetap dimiliki perusahaan di luar penerimaan restitusi. Variabel Restitusi PPN memiliki koefisien regresi positif sebesar 154,425. Nilai koefisien ini menunjukkan adanya hubungan yang searah antara Restitusi PPN dan Arus Kas Operasi. Artinya, setiap kenaikan satu satuan pada nilai restitusi PPN akan diikuti oleh peningkatan arus kas operasi sebesar 154,425 unit, dengan asumsi variabel lain tetap konstan.

Nilai *intercept* sebesar 208,102 menunjukkan bahwa ketika variabel Restitusi bernilai nol, maka nilai variabel dependen diperkirakan sebesar 208,102. Sementara itu, koefisien variabel Restitusi sebesar 154,426 yang bernilai positif mengindikasikan adanya hubungan searah antara Restitusi dan variabel dependen. Artinya, setiap peningkatan satu satuan pada Restitusi akan diikuti dengan peningkatan variabel dependen sebesar 154,426 satuan. Secara konseptual, hal ini menunjukkan bahwa Restitusi memiliki potensi untuk meningkatkan nilai variabel yang diteliti.

Namun demikian, jika dilihat dari nilai signifikansinya melalui p-value, baik intercept maupun variabel Restitusi tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Nilai p-value untuk intercept sebesar 0,548 dan untuk Restitusi sebesar 0,390, yang keduanya lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini berarti bahwa secara statistik, tidak terdapat bukti yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa variabel Restitusi berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, meskipun arah hubungan yang ditunjukkan positif, pengaruh tersebut tidak dapat dianggap meyakinkan secara ilmiah.

Selanjutnya, nilai Multiple R sebesar 0,818 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Restitusi dan variabel dependen tergolong kuat. Nilai ini mengindikasikan adanya keeratan hubungan yang cukup tinggi antara kedua variabel. Akan tetapi, kuatnya hubungan ini tidak didukung oleh signifikansi statistik yang memadai. Oleh karena itu, hasil ini perlu diinterpretasikan secara hati-hati, terutama karena jumlah observasi yang sangat terbatas, yaitu hanya tiga data, yang dapat mempengaruhi keandalan hasil analisis regresi secara keseluruhan.

Pembahasan

Strategi Restitusi dan Faktor Keterlambatan

Untuk mengoptimalkan pengaruh positif ini, perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi pengelolaan restitusi pajak. Pertama, meningkatkan kepatuhan dan dokumentasi dengan memastikan semua faktur pajak masukan lengkap melalui audit internal bulanan dan penggunaan sistem e-Faktur DJP, sehingga mengurangi risiko penolakan klaim. Kedua, optimalisasi timing dengan menyesuaikan jadwal pengadaan material agar mendukung posisi lebih bayar, sambil mempercepat penagihan proyek untuk keseimbangan PPN keluaran. Ketiga, kolaborasi dengan DJP melalui skema percepatan restitusi untuk PKP risiko rendah, termasuk membangun hubungan dengan kantor pajak dan memanfaatkan program compliance seperti Voluntary Disclosure. Keempat, diversifikasi sumber kas dengan hedging pinjaman jangka pendek atau factoring tagihan, serta menyalurkan cadangan kas dari restitusi yang diantisipasi. Kelima, adopsi teknologi seperti software ERP terintegrasi pajak dan pelatihan tim keuangan pada regulasi terbaru untuk efisiensi.

Di sisi lain, faktor keterlambatan proses restitusi menjadi tantangan utama yang memengaruhi efektivitasnya terhadap arus kas. Prosedur audit formal DJP sering memakan waktu 3–12 bulan atau lebih, terutama untuk transaksi volume tinggi di sektor konstruksi, karena verifikasi keabsahan faktur. Ketidaklengkapan dokumen, seperti mismatch data e-Faktur atau bukti pendukung hilang, memperburuk keterlambatan ini, sering disebabkan kesalahan internal atau dari pemasok pihak ketiga. Faktor eksternal seperti beban kerja DJP yang tinggi, atau disrupsi ekonomi juga berkontribusi. Selain itu, risiko hukum berupa penalti jika ditemukan ketidaksesuaian dapat menunda atau membatalkan restitusi. Akhirnya, time lag operasional dari siklus proyek panjang (6–24 bulan) menciptakan jeda antara pengeluaran masukan dan pengembalian kas, yang memperbesar tekanan likuiditas sementara.

Pengaruh Restitusi Pajak terhadap Arus Kas Operasi

Berdasarkan hasil regresi yang menunjukkan bahwa variabel pengaruh restitusi tidak signifikan secara statistik, pengaruh restitusi pajak terhadap arus kas operasi tetap terlihat secara deskriptif dan praktis. Restitusi pajak, yang utamanya berasal

dari selisih PPN masukan lebih besar daripada keluaran, berfungsi sebagai sumber inflow kas tambahan yang krusial di industri konstruksi. Pada periode 2022, misalnya, posisi lebih bayar menghasilkan restitusi positif sekitar Rp 1,95 miliar, yang berkontribusi pada arus kas operasi positif Rp 381 miliar, membantu mengimbangi pengeluaran besar untuk subkontraktor dan material di awal proyek. Secara mekanis, restitusi mengurangi tekanan likuiditas dengan mengembalikan kelebihan pajak yang telah dibayarkan, sehingga mendukung siklus kas yang panjang—dimana outflow operasional sering mendahului inflow dari penagihan termin. Di tahun-tahun sebelumnya (2020–2021), posisi kurang bayar memang menekan arus kas, tetapi penerimaan restitusi kumulatif (Rp 4,95–6,42 triliun) tetap menjadi penyangga utama, menyumbang lebih dari 50% inflow operasi. Pengaruh ini bersifat positif secara keseluruhan, karena restitusi tidak hanya meningkatkan kas bersih tetapi juga memperkuat ketahanan perusahaan terhadap guncangan eksternal seperti pandemi atau penundaan pembayaran pemerintah. Namun, ketergantungan tinggi pada restitusi berisiko jika proses pengembalian tertunda, yang dapat menyebabkan mismatch timing dan tekanan kas sementara.

4. Kesimpulan

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh restitusi pajak terhadap kinerja arus kas pada PT Brantas Abipraya (Persero), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Strategi perusahaan dalam mengoptimalkan pengajuan dan pencairan restitusi pajak dilakukan melalui beberapa langkah penting yang bertujuan untuk mempercepat proses pengembalian pajak dan menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Pertama, meningkatkan kepatuhan administratif dengan memastikan seluruh dokumen pendukung, seperti faktur pajak, kontrak kerja, dan bukti transfer, tersedia secara lengkap dan valid sebelum pengajuan restitusi dilakukan. Kedua, perusahaan memanfaatkan status Wajib Pajak (WP) Patuh agar dapat memperoleh fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau restitusi dipercepat. Ketiga, Pemanfaatan teknologi informasi turut menjadi faktor penting dalam mendukung proses restitusi, terutama untuk memantau status pengajuan secara akurat serta meminimalkan kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). Keempat, koordinasi antarunit dalam perusahaan, khususnya antara tim pajak dan tim proyek, perlu diperkuat agar jadwal pengajuan restitusi dapat disesuaikan dengan kebutuhan arus kas proyek.
2. Kecepatan maupun keterlambatan proses restitusi pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang dapat mempercepat proses restitusi Adalah: Pertama, status wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu sehingga berhak memperoleh pengembalian pendahuluan dengan waktu pencairan paling lama satu bulan. Kedua, kelengkapan dokumen dan ketepatan pengisian SPT juga sangat menentukan kelancaran proses verifikasi oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sebaliknya, keterlambatan restitusi umumnya disebabkan oleh prosedur verifikasi dan audit pajak yang memerlukan waktu cukup panjang, bahkan dapat mencapai dua belas bulan. Ketiga, Kompleksitas administrasi pada proyek pemerintah yang bersumber dari dana APBN atau SBSN juga menjadi salah satu penyebab lamanya proses restitusi karena melibatkan koordinasi antarinstansi. Keempat, kesalahan administratif, seperti ketidaksesuaian perhitungan pajak atau dokumen

pendukung yang tidak valid, sering menjadi faktor utama tertundanya pencairan restitusi.

3. Berdasarkan hasil analisis data dan statistik, restitusi pajak memiliki pengaruh positif terhadap arus kas perusahaan yang diperlihatkan dengan fungsi regresi. Dana restitusi dapat berfungsi sebagai tambahan likuiditas yang penting untuk mendukung pembiayaan operasional, terutama pada tahap awal proyek konstruksi yang membutuhkan modal besar. Secara praktis, restitusi pajak membantu perusahaan menjaga stabilitas arus kas dan memenuhi kebutuhan operasional proyek. Namun, secara statistik pengaruh tersebut ditemukan tidak signifikan dengan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Kondisi ini kemungkinan dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah data atau observasi dalam periode penelitian, sehingga secara statistik belum mampu menunjukkan hubungan yang signifikan meskipun dalam praktiknya restitusi pajak memberikan kontribusi nyata terhadap likuiditas perusahaan.

Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan maupun peneliti selanjutnya:

1. Bagi PT Brantas Abipraya (Persero)
 - a. Penguatan Sistem Monitoring: Perusahaan disarankan untuk mengadopsi teknologi atau *software ERP* yang terintegrasi secara *real-time* dengan sistem perpajakan guna meminimalkan kesalahan input data dan mempercepat proses rekonsiliasi faktur.
 - b. Manajemen Arus Kas yang Proaktif: Sebaiknya perusahaan menyusun jadwal pengajuan restitusi yang diselaraskan secara ketat dengan proyeksi arus kas proyek guna mengantisipasi *time lag* antara pengeluaran modal dan pencairan dana restitusi.
 - c. Peningkatan Kualitas Kerja Sama: Meningkatkan koordinasi dengan mitra KSO dan pemasok pihak ketiga untuk memastikan ketersediaan dokumen faktur yang valid tepat waktu guna menghindari penundaan pemeriksaan oleh kantor pajak.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Perluasan Objek Penelitian: Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel atau periode observasi (lebih dari 3 tahun) agar mendapatkan hasil analisis statistik yang lebih akurat dan signifikan.
 - b. Analisis Variabel Lain: Mengingat variabel restitusi bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi arus kas, disarankan untuk menyertakan variabel lain seperti termin pembayaran pelanggan, efisiensi biaya proyek, atau dampak fluktuasi suku bunga terhadap likuiditas perusahaan konstruksi.

5. Daftar Pustaka

- RZ, R. A., Nasution, A. P., & Barus, M. D. (2022, april). Analisis Tax Planning Atas Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Nindya Prana Kso). *Ensiklopedia Education Review*, 4, 44-45.
- DJP. (t.thn.). *Subjek Pajak PPh Badan*. Diambil kembali dari DJP: <https://pajak.go.id/id/subjek-pajak-pph-badan>
- Fitriya. (2025, Juny 22). *Restitusi Pajak : Contoh, Syarat, Cara Restitusi PPN dan PPh*. Diambil kembali dari Klik Pajak: <https://klikpajak.id/blog/cara-mengajukan-restitusi-ppn-di-e-faktur-dan-syaratnya/>
- Gunawan, C. E., & Rosid, A. (2025). Tax Management Analysis of VAT and Its Implications for the Liquidity of Construction Companies. *Jurnal Akuntansi UNUD*.
- Guo, Y. M., & Li, X. (2023). Economic Analysis and Policy . *The impact of greater VAT tax neutrality on total factor productivity: Evidence from China's VAT credit refund reform in 2018*, 78, 922.
- Hakkam, S., & Winarningsih, S. (2024). Analisis Efektivitas Penerapan Pengembalian Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai sebagai Alternatif Percepatan Restitusi Pajak pada Klien SAR Tax & Management Consultant. *Jurnal Penelitian Inovatif*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009, Januari 15). *PSAK No. 2: Laporan Arus Kas*. Diambil kembali dari Natawidnyana.WordPress.com: <https://natawidnyana.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/01/psak-no-2-laporan-arus-kas.pdf>
- Lathifa, D. (2022, November 17). *Restitusi Pajak: Ini Daftar Wajib Pajak yang Berhak dan Cara Mengajukannya*. Diambil kembali dari OnlinePajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/restitusi-pajak-ini-daftar-wajib-pajak-yang-berhak-dan-cara-mengajukannya>
- Mangundap, P. V., & Tirayoh, V. Z. (2016). Analisis Prosedur Restitusi Kelebihan Pembarayan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 4, 99.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Munawir. (2002). *Akuntansi Keuangan dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Pinto, D. P., Bermúdez, J. C., & Scot, T. (2024, december). VAT Refunds and Firms' Performance: Evidence from a Withholding Reform in Honduras. *Policy Research Working Paper*, 10996, 2.
- Suyanto, & Saputra, A. (2021). *Laporan Keuangan dan Perpajakan Perusahaan*. Depok: Rajawali Pers.
- Tatnya, H. Z., Imani, S. R., Wildany, T. A., Zahirah, N. A., & Wijaya, S. (2023). Strategi Manajemen Perpajakan pada Perusahaan Sektor Energi. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 164-175.
- Thancy, C., Fionasari, D., Zahra, S. N., & Herlina, S. (2024). Analisis Manajemen Pajak untuk Efisiensi Pajak. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 71-77.
- Tirayoh, V. Z., & Mangundap, P. V. (2016). Analisis Prosedur Restitusi Kelebihan Pembarayan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 4, 99.